BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut (Anissa, Nur, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan spt” Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah. Pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam menunjang jalannya roda pemerintahan.

Agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, maka Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak, melakukan reformasi di bidang perpajakan. Penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) dilakukan dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima terhadap wajib pajak.

Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi

pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment*. Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* salah satunya ialah SPT Digital.

Dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT), secara umum yang selama ini dilakukan dengan menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dikirim melalui pos tercatat. Namun sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UUKUP) menyatakan bahwa SPT dapat disampaikan dengan cara lain. Terkait dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) No. KEP-47/PJ/2008 dan KEP-06/PJ/2009, telah ditetapkan cara lain tersebut, yakni secara elektronik, yang kini dikenal dengan elektronik surat pemberitahuan (E-SPT).

Penerapan aplikasi E-SPT memiliki beberapa tujuan diantaranya ialah aplikasi E-SPT dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional hal tersebut sulit dilakukan. Agar tujuan-tujuan penerapan E-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat E-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi E-SPT.

Walaupun telah dilakukan sosialisasi mengenai E-SPT dan manfaatnya, masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan E-SPT. Hal ini disebabkan masih banyak kendala-kendala dalam penerapan E-SPT baik ketersediaan sarana dan prasarana di KPP maupun pemahaman wajib pajak tentang aplikasi E-SPT. Penggunaan E-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat, serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan E-SPT ini menjadi menarik untuk dikaji karena apakah penerapan E-SPT yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaporan pajaknya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Adiguna, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam menggunakan *e-filling* Perkembangan teknologi juga mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama pada perkembangan teknologi internet.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menggunakan arsip elektronik, yang digunakan untuk mendokumentasikan semua arsip-arsipnya. Hal ini merupakan salah satu modernisasi dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh DJP, dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan dalam hal penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan ialah penerapan media elektronik *e-system*.

Semua fasilitas-fasilitas tersebut diberikan guna memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara *self assessment*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan beban atau kewajiban pajaknya sendiri. Dengan kata lain, *e-system* merupakan sistem elektronik yang memberikan informasi mengenai kewajiban pembayaran pajak bagi setiap Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang terdaftar di kantor pajak.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 mewajibkan Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, membayar pajak, serta mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh melalui *e-filling*.

E-filling yaitu sistem pelaporan atau penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time*. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari kantor. Hal ini akan dapat membantu Wajib Pajak

mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. *E-filing* juga membantu karena ada media pendukung dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang akan membantu dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Dengan kata lain juga akan membantu Kantor Pajak dalam penerimaan laporan SPT dan meningkatkan kegiatan pendataan dan pengarsipan laporan SPT.

E-filing digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak terhutang. Sebelum adanya media elektronik *e-filing*, Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan pajak terhutang harus melaporkan sendiri ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau dikirim melalui Kantor Pos secara tercatat atau ketentuan lain sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Pasal 6 ayat 1 dan 2.

Sistem *e-filing* di Indonesia umumnya kurang menarik minat Wajib Pajak di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan pengguna *e-filing* yang masih sedikit di Indonesia. Penyebab sedikitnya minat pengguna *e-filing* dikarenakan sistem *e-filing* masih sangat baru sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan yang menyebabkan Wajib Pajak lebih memilih melaporkan pajak secara manual melalui kantorpos atau kantor Direktorat Jenderal Pajak dibandingkan dengan menggunakan sistem *e-filing*. Kekurangan-kekurangan itu bisa terjadi karena adanya kelemahan yang ada pada sistem teknologi informasi di Indonesia, maupun mengenai persepsi yang ada pada Wajib Pajak.

Menurut (Tumuli¹, Sondakh², & Wokas³, 2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis penerapan E-SPT dan *e-filing* dalam upaya peningkatan

kepatuhan wajib pajak (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama manado)”
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 menyatakan bahwa Penerapan *e-filling* telah dilakukan semenjak tahun 2004, maka hingga tahun 2016 ini berarti penerapan *e-filling* sudah mencapai 12 Tahun

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Pajak wajib dibayarkan bagi wajib pajak.
2. Keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih relatif rendah.
3. Masih banyak wajib pajak yang masih belum memanfaatkan atau menggunakan sistem *e-filling* dan E-SPT.
4. Pelaporan Pajak sebelum diterapkannya sistem *e-filling* dan E-SPT sangat memakan waktu dan antian pelaporan yang lama, menjadi salah satu penyebab berkurangnya Wajib Pajak yang melaporkan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah yang ada, peneliti mencoba membatasi masalah yang hendak dipecahkan melalui kegiatan penelitian. Batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai Pengaruh Penerapan Sistem *E-filling* dan E-SPT terhadap ketepatan data SPT tahunan. Penelitian dilaksanakan pada perusahaan PT. Patria Maritim Perkasa di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem *e-filing* memberikan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa?
2. Bagaimana Sistem E-SPT memberikan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa?
3. Sejauh mana pengaruh Sistem *e - Filing* dan Sistem *e - SPT* terhadap data Wajib Pajak pada PT Patria Maritim Perkasa?

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut peneliti masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk memperoleh gambaran Sistem *E-filing* dalam memberikan Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa.
2. Untuk memperoleh gambaran Sistem E-SPT dalam memberikan Kepatuhan pelaporan Wajib Pajak bagi Karyawan PT Patria Maritim Perkasa.
3. Untuk mengetahui Sejauh mana pengaruh Sistem *E-filing* dan Sistem E-SPT terhadap data Wajib Pajak pada PT Patria Maritim Perkasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dalam dua aspek, diantaranya adalah:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang memperkuat teori yang menyatakan Bahwa pengolahan data wajib pajak masih dipengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada atau menambah teori yang sudah ada.
2. Memberikan masukan kepada para akademisi sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan hasil kajian.

1.6.2 Secara Praktis

Sebagai bahan masukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan data dan membantu manajemen untuk mendapatkan data yang akurat serta pengembangan sistem yang menunjang kemajuan perusahaan.